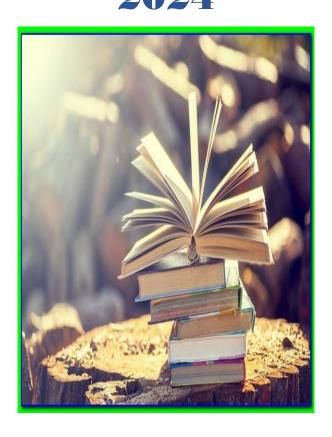


Rencana Kerja





DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T.M.P Lapaktana No. 5 Telp. (0383) 21151, Fax (0383) 21453 Kode Pos 86218

e-mail : diskopukm flotim@yahoo.com LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 telah selesai disusun dan sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa: "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)".

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra OPD tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 Kabupaten Flores Timur pada aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan,Program, Kegiatan dan Anggaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) ini berkat partisipasi semua pihak khususnya semua elemen perangkat daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) ini. Dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) akan menjadi rujukan dalam penyusunan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran di tahun 2024. Sangat disadari bahwa tanpa bantuan semua pihak dokumen Renja OPD ini tidak dapat terwujud.

Larantuka, Juli 2023 Kepala Dinas Kepekasa, Isaha Kecil dan Menengah Kabapaten Klores Timur, M

> Pembina Utama Muda NIP. 19650516 199203 1 008

DinkopUKM - Renja 2024 Page i

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Daftar isi	İ
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN L	ALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra	
Perangkat Daerah	
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 1	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja	}
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat	4
BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah47	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 54	,
BAB. V. PENUTUP	,





RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR 2023



BUPATI FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores 14 Timur Nomor Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA **KERJA** PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- 3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang/perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
- Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2023-2026.
- 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, serta Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Tahun 2024, serta dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

- (1) Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.
- (2) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka pada tanggal 3 Juli 2023 PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka pada tanggal 3 Juli 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMBINA TK.I NIP.19780426 200212 1 007

ORDANUS HOGA DATON

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang startegis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan

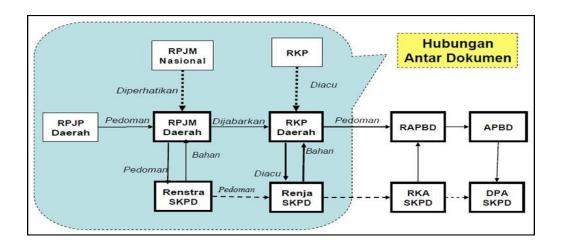


2024

ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut : 1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah. 2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2022. 3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk meperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah 5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023; 6. Penetapan; dilaksanakan berdasrkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomodasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati. Sebagimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Selanjutnya Renja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan recana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2024. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;



Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
 - Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
 - Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tetang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;

- 25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- 26. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.



2024

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah - kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja 2022 merupakan tahun terakhir Renstra 2017 – 2022, untuk Program Penunjang Urusan Kabupaten masih dengan indikator yang sama sedangkan pada Program Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2022 capaian 36,3%. Dan untuk tahun 2023 - 2026 dengan target indikator 47,83% dan target 7 program, sebagaimana di gambar pada table 2.1 Sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

	Kode 1	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil program		realisasi kinerj. an kegiatan SK 2020		Target program /	Perkiraan realisa target program/ Renstra SKPD sam Tahun 20	kegiatan pai dengan			
		Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	(outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra PD) Tahun 2022	dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target renja perangkat daerah tahun 2022	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	kegiatan (Renja SKPD 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan		
		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(10/4)	12		
1	08			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah										
1	08	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	126	100	363	363%				
					Kualitas sarana parasarana aapratur (%)	100	60	100	242	242%				
					Jumlah Dokumen Pengendaliaan dan Evaluasi Pencapaian Indikator Linerja OPD (dokumen)	7		7	7	100%				
				Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

1	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan (dokumen)	35	28	7	7	100%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	12	14	14	100%		
1	01	2.02	02	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12	12	12	12	100%		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	4	4	2	24	1200%		
1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor (unit)	-	-	-	-			
1	01	2.02	04	Penyedian Bahan Logistik	Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	12	24	4	16	400%		
				kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)	12	38	31	31	100%		İ
1	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	80.150	80.150	40.000	87.545	219%		
1	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	4	4	2	8	400%		
1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman(Om)	365	365	250	2.598	1039%		
1	01	2.06	09	Penyelnggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersediannya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (kali)	17	17	55	184	335%		
1	01	2.07		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kualitas sarana prasarana aparatur (%)							
1	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Tersedianya Meubeler (unit)	-	-	-	-	-		
1	01	2.08		Penyedian jasa penunjang	Terlaksananya Pelayanan							

				urusan pemerintahan daerah	Administrasi Perkantoran (%)							
1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat (kali)	12	12	150	41	27%		
1	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik (bulan)	12	12	12	12	100%		
1	01	2.08	04	Jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	29	29	36	120	333%		
1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah								
1	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang difasilitasi perizinannya	10	10	9	38	422%		
1	01	2.07	02	perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Tersedianya pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional		-	1	2	200%		
1	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantro yang dipelihara (unit gedung)	1	1	1	4	400%		
1	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	terpeliharaanya gedung kantro (unit)	13	13	12	52	433%		
2	17	03		Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pengembangan Wirausaha baru / wirausaha pemula (wirausaha baru)	30	111	5	30	600%		
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota								
				Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian,	Jumlah koperasi / KUD yang dilatih (KUKM)	-	-	90	285	317%		
2	17	03	2.01.01	ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa (koperasi)	-	-	10	-	0%		
2	17	04		Program Penilaian						600%		

				kesehatan KSP/USP		30	111	5	30			
2	17	04	2.01	koperasi Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		-		5	20	400%		
2	17	04	2.01.01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten / kota	Jumlah kelompok sasaran (koperasi)	50	50	40	130	325%		
2	17	04	2.01.02	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kelompok sasaran (koperasi)	10	10	10	40	400%		
2	17	05		Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	30	111	5	30	600%		
2	17	05	2.01	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	-						
2	17	05	2.01.01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Sosialisasi, Sinkronisasi, sarasehan, Lomba Asah terampil	15	15	3	13	433%		
2	17	06		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		30	111	5	30	600%		
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1		40	145	363%		
2	17	06	2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT (koperasi)	61	61	40	145	363%		

2	17	07		Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Jumlah UKM/LKM (UMKM)	604	581	100	11	11%		
2	17	07		(UMKM)	Pengembangan Wirausaha baru / wirausaha pemula (wirausaha baru)	-						
2	17	07	2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah UKM/LKM (UMKM)	-	-	662	2.648	400%		
2	17	07	2.01.01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Dokumen Data Base UKM/UMKM (Dokumen)	50	50	1	4	400%		
2	17	07	2.01.02	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Pemula/ Baru (UMKM)	500	500	457	1.371	300%		
2	17	07	2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM yang dilatih (UMKM)	60	60	30	120	400%		
2	17	08		Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM/ KLM (UMKM)	604	581	100	11	11%		
					Pengembangan Wirausaha baru / wirausaha pemula (wirausaha baru)	3.000	1.893	500	4	1%		
					UMKM dan Koperasi yang diperkuat Sistem Pemasaran (UMKM)	354	3	30	-	0%		
2	17	08	2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		-		5	-	0%		
		_		Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam	Jumlah fasilitas Pengembangan UKM (UKM)	-		5	22	440%		
2	17	08	2.01.01	pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah wirausaha pemula/wirausaha baru (UMKM)	325	50	23	21	91%		

KODE 1	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil program		ealisasi kinerj an kegiatan Sk 2020		Target program /	Perkiraan realisa target program/ Renstra SKPD sam Tahun 20	/kegiatan pai dengan			
	KODE		Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	(Renstra PD) s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)	dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target renja perangkat daerah tahun 2022	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	kegiatan (Renja SKPD 2023)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Catatan
	1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(10/4)	12
			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah										
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100								
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100								
				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100								
				Peresentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100								

P	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
P C	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8			2		0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	8			2		0%	
L	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	15			6	3	20%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	16			4		0%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)							
P	Penyediaan Gaji dan Funjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14			14	8	57%	
P	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36			12	-	0%	
d P	Pelaksanaan Penatausahaan lan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)							

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	8			2	1	13%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)							
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3					0%	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18					0%	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	12			6	0	0%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)							
Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (Dok)	36					0%	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian(dokumen)				1	0		

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	48			12	1	2%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	17			2	0	0%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)				3	0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12			3	0	0%	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8			2	1	13%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan (Paket)	3					0%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4			1	1	25%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8			2	1	13%	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	8			2	0	0%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi				12	4	8%	1

	Kunjungan Tamu (Laporan)	48		1					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48				12	3	6%	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	4				1		0%	
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis eletronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis eletronik pada SKPD	36						0%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)					2	0		
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	5				3		0%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	3				2		0%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	6				4	0	0%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)					2			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)								
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					12	0	0%	

	(laporan)	48						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48			12	4	8%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)				12	0		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48			12	1	2%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	10			10	1	10%	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15					0%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19					0%	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)				1			
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1			1	1	100%	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/ direhabilitasi(unit)	25			24	2	8%	

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)				1	0		
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi(%)							
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota (unit usaha)	376			88	376	100%	
	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi(%)							
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10			10	10	100%	
	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian(%)							
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian (orang)							
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian(orang)	240			60	60	25%	
	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)							
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Kelurga yang mengikuti sosilaisasi							

yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota								
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkata Taraf Hidup Keluarga Melal Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya	ii kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya (Keluarga) Cakupan pemberdayaan	70			10	10	14%	
	usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)							
Pemberdayaan Usaha Mik yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	diberdayakan(unit usaha)							
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Unit Usaha	960			240	0	0%	
Pemberdayaan Kelembagaa Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro(unit Usaha)	300			240	0	0%	
	Persentase UMKM yang bergerak dibidang							

		pertanian yang berbadan Hukum(%)							
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terfasilitasi (Unit Usaha)							
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi (Unit Usaha)	70			10	0	0%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	o Indikator SPM/Standar		IKK Target RENSTRA PD				PD	Realisasi Capaian Pro			eksi	Catatan Analisis	
		Nasional		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
1	Presentase Koperasi Aktif		V	20 %	85	88	90	14,13	-	90	88	Mengukur Peningkatan Koperasi yang berkualitas yaitu : Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset dibagi Jumlah Seluruh Koperasi di kali seratus	
2	Presentase UKM non BPR/LKM aktif		V	4,37	4,37	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Kegiatan	
3	Presentase BPR/LKM aktif		V	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Kegiatan	
4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil		V	20 %	2,06	2,22	2,38	1,90	-	2,06	2,22	Mengukur peningkatan usaha Mikro yang menjadi wirausaha yaitu : Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah Usaha Mikro keseluruhan di kali seratus	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Isu – isu Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- Kurangnya Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 2. Rendaha Kualitas Sumber Daya manusia pengeloah dan Kesadaran Koperasi
- 3. Belum Optimalnya pengutana Kapasitas kelembagaan, bantuan permodalan,

1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

		RAN	CANGAN AWAL RKPD				HASIL A	NALISIS KEBUTUHAN			
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				4.214.316.368	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				3.264.341.964	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Larantuka	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantorran (%)	100	3.421.974.937	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Larantuk a	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantorran (%)	100	2.421.820.064	
		Larantuka	Preentase ketersedian sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100%			Larantuka	Preentase ketersedian sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100%		
		Larantuka	Presentase ASN yang memeiliki kesesuaian Kompetensi (%)	100%			Larantuka	Presentase ASN yang memeiliki kesesuaian Kompetensi (%)	100%		

	Larantuka	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%			Larantuka	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%		
Perencanaan, Penganggaran, dan		Tersedianya dokumen perencanaan.	12		Perencanaan, Penganggaran, dan		Tersedianya dokumen perencanaan,	12		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	penganggaran dan evaluasi (dok)	dokumen	103.900.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	penganggaran dan evaluasi (dok)	dokumen	50.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 dokumen	36.900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2 dokumen	15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	4 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD(dok)	2 dokumen	15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	4 Iaporan	37.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	3 Iaporan	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	2 laporan	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	4 laporan	10.000.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	3 dokume n	2.192.370.267	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)		1.999.520.064	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	29 org/12 bulan	2.112.375.267	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	29 orang / 14 bulan	1.920.820.064	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1 dokumen	49.995.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12 dokumen	68.700.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	2 dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	2 Iaporan	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6 dokume n	27.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6 dokumen	15.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Larantuka	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD			Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik Daerah pada	1	5.000.000	

Milik Daerah							SKPD			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	5.000.000	
Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan	27.500.000	Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	13 dokume n/ 5 orang	145.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	13 dokumen/ 5 orang	25.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 dokumen	5.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	16.500.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	5.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	15.000.000	

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Administrasi Umum	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase ketersediaan	3 orang	38.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Administrasi Umum	Larantuka	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase	100,0	-	
Perangkat Daerah		sarana dan prasarana kantor (%)		376.574.670	Perangkat Daerah		ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		139.300.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 paket	3.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3 paket	2.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)(ATK dan Kelengkapan Komputer	1 paket sound system, infocus	66.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)(ATK dan Kelengkapan Komputer	3 paket	15.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	7.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (BBM)	1 Paket	60.277.773	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (BBM)	1 paket	20.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2 paket (foto copi dan cetak)	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2 paket	20.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.750.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Larantuka	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	1.800.000	

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Rapat dan Tamu)	12 laporan	36.300.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Rapat dan Tamu)	12 laporan	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Iaporan	156.946.897	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	50.000.000	
penatausahaan arsi dinamis pada SKPD	Larantuka	Jumlah dokumen penatausahaan arsi dinamis pada SKPD	12 laporan	6.000.000	penatausahaan arsi dinamis pada SKPD	Larantuka	Jumlah dokumen penatausahaan arsi dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Larantuka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Larantuka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	2.500.000	
pada SKPD					pada SKPD					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	472.530.000	pada SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	145.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Larantuka	jasa penunjang Urusan	100 12 laporan	472.530.000 1.650.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Larantuka	pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah	100 12 laporan	145.500.000 1.500.000	

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Iaporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	54.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 laporan (30 orang)	348.480.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	104.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	47.500.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	47.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Larantuka	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	30.000.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	1	4.600.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Larantuka	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara			
Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Pemeliharaan Mebel	Larantuka	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 unit	2.500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	7 unit	5.000.000	
Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung	Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung	Larantuka	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	1 unit	5.000.000	

Kantor dan Bangunan Lainnya		(unit)			Kantor dan Bangunan Lainnya		(unit)			
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24	27.500.000	20. 30.00.					
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	0	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	2 unit	5.000.000	
PROGRAM URUSAN KOPERASI				792.341.431	PROGRAM URUSAN KOPERASI				842.521.900	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	50,00%	38.500.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	52,00%	36.500.000	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam	Larantuka	jumlah koperasi yang taat pada peraturan	92	38.500.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam	Larantuka	jumlah koperasi yang taat pada peraturan	92 unit	36.500.000	
Koperasi		Jumlah Koperasi yang			Koperasi		Jumlah Koperasi yang	92 unit		

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Laratuka	Presentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	10 Koperasi	50.000.000	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Laratuka	Presentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	10 Koperasi	15.000.000	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Laratuka		10 Koperasi	50.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Laratuka		10 Koperasi	15.000.000	
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Laratuka	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10	50.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Laratuka	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10 Koperasi	15.000.000	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Larantuka	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian	60	78.000.000	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Larantuk a	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian	125	530.850.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Laratuka	jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian	60	78.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Laratuka	jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian	125	530.850.000	

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Larantuka	jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian	3 dokumen	78.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Larantuka	jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian	125	530.850.000	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Larantuka	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)	40%	45.000.000	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Larantuk a	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)	40%	25.000.000	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Larantuka		15 keluarga	45.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Larantuka		10 keluarga (kelompok embrio)	25.000.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya	Larantuka	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya	15 keluarga	45.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya	Larantuka	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya	10 keluarga (kelompok embrio)	25.000.000	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Larantuka	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)	23,53	100.500.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Larantuk a	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)	23,53	65.000.000	

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				100.500.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			240	65.000.000	
Pendataan Potensi dan Pemgembangan Usaha Mikro	19 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pemboayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota	240	50.000.000	Pendataan Potensi dan Pemgembangan Usaha Mikro	19 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif, Bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pemboayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota			
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	240	50.500.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	19 Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Larantuka	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	-	-	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Larantuka	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	240	65.000.000	
Program Pengembangan UMKM	Larantuka	Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum	1,04	480.341.431	Program Pengembangan UMKM		Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum	1,04	170.171.900	

U	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Larantuka		16 unit usaha	480.341.431	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Larantuka		16 UMKM	170.171.900	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	Desa Lamanabi- Kecamatan Tanjung Bunga, Kel. Pohon Sirih, Kel.Balela, Desa Mokantarak , Kel. Amagarapi. Desa Birawan - Kecamatan Ile Bura	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16 unit usaha	480.341.431	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	16 UMKM	170.171.900	

1.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat

Usulan ususlan masyarakat pada Program dan Kegiatan yang didanai oleh APBD II melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan terlebih dahulu diklarifikasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur dan Apabila sesuai dengan program kegiatan yang ada maka akan diakomodir sesuai kebutuhan dan skala prioritas daerah. dan selanjutnya terhadap usulan kegiatan yang tidak dapat diakomodir pada APBD II, akan didorong melalui dana APBD I dan APBN.



Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten: Nusa Tenggara Timur/ Kabupaten Flores Timur

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar / Volume	Catatan
1	Program Pendidikan dan Pelatihan		Persentase SDM yang		
	Perkoperasian		Memahami Pengetahuan Koperasi		
	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang				
	Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah				
	Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman	(Desa Lewobele (Dusun1 s/d 4), Lewobele, Kec.	Jumlah SDM yang Memahami	20 Orang	
	dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Adonara Tengah) (Lewopao, Kec. Adonara Tengah)	Pengetahuan Koperasi	7 Orang	
		(RT.005/RW.003 Dusun 2 Labanaen - Desa Joleng, Boleng, Kec. Ile Boleng)		100 Orang	
		(Kolidatang, Laka, Kolaka, Kec. Tanjung Bunga)		6 Orang	
		(Peningkatan Kapasitas pengurus Bumdes, Desa Lewobunga, Lewobunga, Kec. Tanjung Bunga)		3 Orang	
		(Desa Lemanu, Lemanu, Kec. Solor Selatan)		10 Orang	
		(Desa Kawuta, Kawuta, Kec. Solor Timur)		50 Orang	

		(Perlu ada peningkatan SDM untuk kelompok UMKM di Dusun 1, 2 dan 3 dan untuk Kelompok PKK serta adakah pasar murah untuk masyarakat Dusun 1, 2 dan 3, Menanga, Kec. Solor Timur)		200 Orang
		(Desa Ongalereng, Ongalereng, Kec. Solor Barat)		7 Orang
		(Desa/Kelurahan se Kecamatan Solor Barat, Solor Barat)		15 Orang
		(Peningkaran penegtahuan tentang koperasi kepada pengurus agar mampu mengelolah dan mengembangkan koperasi (bumdes) DI DESA IEWOINGU, kECAMATAN TITEHENA, Lewoingu, Kec. Titehena)		10 Orang
		(DESA TENAWAHANG KECAMATAN TITEHENA, Tenawahang, Kec. Titehena)		100 Orang
		(KOPERASI TOBI TA"A DESA LEWOTOBI, Birawan, Kec. Ile Bura)		3 Orang
		(DESA HURUNG, Hurung, Kec. Adonara Barat)		5 Orang
		(Desa Dawataa, KSP Dawataa Mandiri, Dawataa, Kec. Adonara Timur)		7 Orang
		(Desa Lelenbala, Lelen Bala, Kec. Adonara Timur)		15 Orang
2	Program Pengembangan UMKM		Presentase UMKM yang Bergerak di Bidang Pertanian Memiliki Badan Hukum	

Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orietansi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Sub Kegiatan : Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	(Desa Tikatukan, Tikatukan, Kec. Adonara)	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10 Unit Usaha
	(Desa Pandai, Pandai, Kec. Wotan Ulumando)		10 Unit Usaha
	(Desa Pandai, Pandai, Kec. Wotan Ulumando)		10 Unit Usaha
	(Desa Pandai, Pandai, Kec. Wotan Ulumando)		10 Unit Usaha
	(DESA BAYA, Baya, Kec. Adonara Tengah)		40 Unit Usaha
	(Desa Hoko Horowura, Hoko Horowura, Kec. Adonara Tengah)		2 Unit Usaha
	(Desa Kenotan, Kenotan, Kec. Adonara Tengah)		30 Unit Usaha
	(Desa Kenotan, Kenotan, Kec. Adonara Tengah)		1 Unit Usaha
	(Nubalema, Nubalema, Kec. Adonara Tengah)		15 Unit Usaha
	(Desa Gayak, Nelereren, Kec. Ile Boleng)		2 Unit Usaha
	(DUSUN 1,2,3 Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Boleng, Kec. Ile Boleng)		30 Unit Usaha
	(Desa Nelelamawangi, Nelelamawangi, Kec. Ile Boleng)		13 Unit Usaha
	(Desa Dokeng, Dokeng, Kec. Ile Boleng)		4 Unit Usaha

(Desa Bayuntaa, Bayuntaa, Kec. Ile Boleng)	3 Uit Usaha	
(Desa Balaweling, Balaweling, Kec. Witihama)	6 Unit Usaha	
(3 unit Mesin Pencetak Batako/Pavin Blok, Watololong, Kec. Witihama)	3 Unit Usaha	
(Kolidatang, Laka, Kolaka, Kec. Tanjung Bunga)	8 Unit Usaha	
(Desa Wailolong Kecamatan Ile Mandiri		
Kabupaten Flores Timur, Wailolong, Kec. Ile	18 Unit Usaha	
Mandiri)		
(Desa Riangkemie, Kec. Ile Mandiri, Kab. Flores	1 Unit Usaha	
Timur, Riangkemie, Kec. Ile Mandiri)		
(DESA LEWOHALA - KECAMATAN ILE MANDIRI, Lewohala, Kec. Ile Mandiri)	5 Unit Usaha	
(Kelompok Usaha Bersama Kelurahan		
Amagarapati, Amagarapati, Kec. Larantuka)	1 Unit Usaha	
(RT 01, RT 03, KELURAHAN BALELA,		
Balela, Kec. Larantuka)	6 Unit Usaha	
(RT 01 s/d RT 017, Waibalun, Kec. Larantuka)	10 Unit Usaha	
(RT.001-010, Sarotari Timur, Kec. Larantuka)	10 Unit Usaha	
(Dusun I, II, III Desa Lamawalang, Lamawalang,		
Kec. Larantuka)	30 Unit Usaha	
(PEDAGANG KECIL DI DESA KALIKE	1411 211 1	
AIMATAN, Kelike Aimatan, Kec. Solor Selatan)	14 Unit Usaha	
(Desa Kalike, Kelike, Kec. Solor Selatan)	1 Unit Usaha	
(Desa Lewomuda, Kec. Demon	211 111 1	
Pagong)	3 Unit Usaha	

ı	1	1	1 1
	(Desa Lewokluok, Kec. Demon Pagong, Kab. Flores Timur, Lewokluok, Kec. Demon Pagong)	3 Unit Usaha	
		7 114 111	+
	(Desa Kawuta, Kawuta, Kec. Solor Timur)	7 Unit Usaha	
	(Balai Pertemuan Desa, Menanga, Kec. Solor	30 Unit Usaha	
	Timur)	30 Clift Osaila	
	(Desa watobuku Kecamatan solor Timur,	15 Unit Usaha	
	Watobuku, Kec. Solor Timur)	13 Onit Osana	
	(Desa Watohari, Watohari, Kec. Solor Timur)	1 Unit Usaha	
	(Dusun I, Dusun II dan Dusun III, Liwo, Kec.	25 IInit IIaaha	
	Solor Timur)	25 Unit Usaha	
	(Desa Lamawalang, Lamawalang, Kec. Solor	20 Unit Usaha	
	Barat)	20 Onit Osana	
	(Kelurahan Ritaebang, Ritaebang, Kec. Solor	8 Unit Usaha	
	Barat)	o Unit Usana	
	(DESALEWOLAGA, Lewolaga, Kec. Titehena)	1 Unit Usaha	
	(Desa Tuakepa, Tuakepa, Kec. Titehena)	40 Unit Usaha	
	(DESA TENAWAHANG KECAMATAN	10 11 2 11 1	
	TITEHENA, Tenawahang, Kec. Titehena)	10 Unit Usaha	
	(6 Dusun di Desa Boru, Boru, Kec.		
	Wulanggitang)	6 Unit Usaha	
	(Desa Pululera, Pululera, Kec. Wulanggitang)	5 Unit Usaha	
	(Desa watobaya, Watobaya, Kec. Adonara Barat)	4 Unit Usaha	
	(RT 01 sd RT 012, Teromh, Kec. Adonara	150	
	Timur)	150 Unit Usaha	
			1

(Dusun I, II dan III Desa Bilal, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Bilal, Kec. Adonara Timur)	8 Unit Usaha
(Untuk Kelompok Usaha kecil di Desa Waiburak	
Yg terhimpun dari Dusun I, II, III dan Dusun IV,	35 Unit Usaha
Waiburak, Kec. Adonara Timur)	
(Desa Karinglamalouk, Kec. Adonara	
Timur, Kab. Flores Timur, Karinglamalouk, Kec.	10 Unit Usaha
Adonara Timur)	
(Desa Tapobali, Tapobali, Kec. Adonara Timur)	10 Unit Usaha
(Desa Kwaelaga Lamawato, Kwaelaga	20 Unit Usaha
Lamawato, Kec. Adonara Timur)	20 Onit Osana



BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Nasional Tahun 2024, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 tersebut, maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi : (1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, (4) Penguatan Daya Saing Usaha, (5) Pembangunan Rendah Korban dan Transisi Energi, (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Pelaksanaan Pemilu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar 2021	Target Kinerja Sasaran 2024
Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	1,45	2,35

Angka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni: "Penguatan Ekonomi Dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar", dengan fokus pada 4 (empat) Proritas pembangunan.

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kenerja sebagaimana terlihat pada Tabel berikut;

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1. Perekonomian Masyarakat	1.3 Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	2,35
	1.5 Meningkatkan peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	0,50

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2024

Program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan pertimbangan faktor-faktor berikut :

- 1. Pencapaian misi daerah yang tertuang dalam dalam RPJPD
- 2. Intervensi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- 3. Kesinambungan program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya
- 4. Pendayagunaan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 tahun 2024 terdiri dari 2 program prioritas dan 5 program penunjang, 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten Flores Timur dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan kapasitas aparatur;
- 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 7. Program Pengembangan UMKM

Total pagu indikatif tahun 2024 adalah sebesar total anggaran seluruhnya untuk **Belanja** sebesar **Rp. 3.264.341.964** (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus enam puluh empat rupiah). dengan sumber dana berasal dari DAU.



2024

Total program prioritas tahun 2024 terdiri dari 1 program dengan besaran pagu anggaran **sebesar Rp. 170.171.900** (seratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yaitu Program Pengembangan UMKM

Rumusan rencana program prioritas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA	N KINERJA DA	N KERANGKA PENI	DANAAN	CATATA N	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
						PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGE T	KEBUTUHA N DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBE R DANA	PENTIN G	TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
			(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1 7					PROGRAM URUSAN KOPERASI			842.521.900					1.178.716.882
2	1 7	0 3				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	50%	36.500.000				52%	42.350.000
2	1 7	0 3	2	0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi			36.500.000				96 unit	42.350.000

2	1 7	0 3	2	0 1	000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Wilayah Keanggotaanny a Daerah Kabupaten/	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	92 unit usaha	36.500.000	19 Kecamatan		96 unit usaha	42.350.000
2	1 7	0 4				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	5.43%	15.000.000			10 Koperasi	55.000.000
2	7	0 4	2	0 1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaann ya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /			15.000.000			10 Koperasi	55.000.000
2	1 7	0 4	2	0 1	000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian	10 Koperas i	15.000.000	19 Kecamatan		10 Koperasi	55.000.000

						Kabupaten / Kota	kesehatan						
2	7	0 5				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian	19.57	530.850.000			60	85.800.000
2	1 7	0 5	2	0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota			530.850.000			60	85.800.000
2	1 7	0 5	2	0 1	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian	125	530.850.000	Larantuka		60	85.800.000
2	1 7	0				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdaya an dan perlindungan Koperasi (%)	60%	25.000.000		DAU	60%	49.500.000

2	1 7	0 6	2	0 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten / Kota			25.000.000		DAU		49.500.000
2	1 7	0 6	2	0 1	000 2	Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembang an ekonomi lainya	10 keluarg a (kelompo k embrio)	25.000.000	Kec. Adonara (Desa Lamahoda), Kec. Witihama (Desa Lamablawa, Pledo, Balaweling), Kec. Wotan Ulumado (Desa Bliko, Nayubaya), Kec. Adonara Barat (Desa Ile Pati), Kec. Adonara Timur (Desa Kwarlaga), Kec. Solor Timur (Desa Lohayong), Kec. Tanjung Bunga (DesaGekengdera ng)	DAU	20 keluarga (kelompok embrio)	49.500.000

2	1 7	0 7				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdaya an usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)	23,53	65.000.000		DAU	23,53	151.250.000
2	1 7	0 7	2	0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			65.000.000		DAU		151.250.000
2	1 7	0 7	2	0	001 4	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	240 unit usaha	65.000.000	19 Kecamatan		240 unit usaha	72.600.000
2	1 7	0 8				Program Pengembangan UMKM	Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum	1,67	170.171.900		DAU	2,08	794.816.882
2	1 7	0 8	2	0		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan			170.171.900		DAU	20 unit usaha	794.816.882

						Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							
2	1 7	0 8	2	0 1	000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	16 unit usaha	170.171.900	Kec. Titehena (Desa Leraboleng, Tuakepa, Watowara), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Hewa), Kec Lewolema (Desa Riangkotek), Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Lite), Kec. Larantuka (Kel. Sarotari, Lokea, Sarotari Tengah, Balela, Pohon Bao), Kec. Witihama (Desa Honihama)	DAU	20 unit usaha	794.816.882

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan pada Daerah. Maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

						URUSAN / BIDANG	INDIKATOR KINER IA	CAPAIAN	I KINERJA DAN P	KERANGKA PEN	IDANAAN	САТАТА		Maju Rencana nun 2025
		K	ODE			URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGE T	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBE R DANA	N PENTING	TARGE T	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
			(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1 6	0	2	0 2	000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			3.264.341.964					4.503.117.705
2	1 7	0				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi perkantoran (%)	100	2.421.820.064				100	3.324.400.823
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100%					100	134.288.051
							Persentase ASN yang Memiliki Kessuaian Kompetensi (%)	100					100	2.219.622.772
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100	25.000.000

2	1 7	0	2		01	Perencanaan, Penganggaran,			50.000.000				134.288.051
						dan Evaluasi							
						Kinerja Perangkat							
						Daerah							
2	1	0	2	0	000	Penyusunan	Jumlah Dokumen	2	15.000.000	Larantuka	DAU	2	47.088.051
	7	1		1	1	Dokumen	Perencanaan Perangkat	dokume				dokume	
						Perencanaan	Daerah (dok)	n				n	
						Perangkat Daerah							
2	1	0	2	0	000	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	15.000.000	Larantuka	DAU	2	20.200.000
	7	1	_	1	2	Penyusunan	dan Laporan Hasil Koordinasi	dokume	10.000.000	Laramaka	D/ (O	dokume	20.200.000
	-			-	_	Dokumen RKA	Penyusunan Dokumen RKA-	n				n	
						SKPD	SKPD(dok)						
2	1	0	2	0	000	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian	3	10.000.000	Larantuka	DAU	3	37.000.000
	7	1		1	6	Penyusunan	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	laporan				laporan	
						Laporan Capaian	Kinerja SKPD dan Laporan						
						Kinerja dan	Hasil Koordinasi Penyusunan						
						Ikhtisar Realisasi	Laporan Capaian Kinerja dan						
						Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)						
2	1	0	2	0	000	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi	4	10.000.000	Larantuka	DAU	4	30.000.000
	7	1		1	7	Perangkat	Kinerja Perangkat	laporan				laporan	
						Daerah	Daerah(Laporan)	•				•	
2	1	0	2	0	02	Administrasi							
	7	1		1		Keuangan			1.999.520.064				2.219.622.772
	4	_		_	000	Perangkat Daerah		00			DALL	00	
2	7	0	2	0 2	000	Penyediaan Gaji	Jumlah orang yang menerima	29 orang / 14	1.920.820.064	Larantuka	DAU	29 orang / 14	2.154.622.772
	′	'			ı	dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	bulan	1.920.020.064			bulan	2.104.022.772
2	1	0	2	0	000	Penyediaan	Jumlah Dokumen hasil	12	68.700.000	Larantuka	DAU	12	45.000.000
	7	1		2	1	Administrasi	penyediaan Administrasi	dokume				dokume	
						Pelaksanaan	Pelaksanaan Tugas	n				n	
		ĺ				Tugas ASN							

			_			 1							
2	1	0	2	0	000	Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan	2	10.000.000	Larantuka	DAU	2	20.000.000
	7	1		2	7	Penyusunan	Bulanan/	laporan				laporan	
						Laporan	Triwulanan/ Semesteran						
						Keuangan	SKPD dan Laporan						
						Bulanan/	Koordinasi Penyusunan						
						Triwulanan/	Laporan Keuangan						
						Semesteran	Bulanan/Triwulanan/Semester						
						SKPD	an SKPD						
2	1	0	2	0		Administrasi			15.000.000				25.000.000
	7	1		3		Barang Milik							
						Daerah pada							
						Perangkat Daerah							
2	1	0	2	0	000	Penyusunan	Jumlah Rencana Kebutuhan	1	5.000.000	Larantuka	DAU	1	10.000.000
	7	1		3	1	Perencanaan	Barang Milik Daerah pada	dokume				dokume	
						Kebutuhan	SKPD	n				n	
						Barang Milik							
						Daerah							
2	1	0	2	0	000	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	6	5.000.000	Larantuka	DAU	6	10.000.000
	7	1		3	5	Penyusunan	dan Penyusunan Laporan	laporan				laporan	
						Laporan Barang	Barang Milik Daerah pada						
						Milik Daerah	SKPD						
						pada SKPD							
2	1	0	2	0	000	Penatausahan	Jumlah Laporan	2	5.000.000	Larantuka	DAU	2	5.000.000
	7	1		3	6	Barang Milik	Penatausahan Barang Milik	laporan				laporan	
						Daerah pada	Daerah pada SKPD						
						SKPD							
2	1	0	2	0		Administrasi			25.000.000			-	100.000.000
	7	1		5		Kepegawaian							
						Perangkat Daerah							
2	1	0	2	0	000	Pendataan dan	Jumlah Dokumen Pendataan	12	5.000.000	Larantuka	DAU	12	10.000.000
	7	1		5	3	Pengelolaan	dan Pengelolaan Administrasi	dokume				dokume	
						Administrasi	Kepegawaian	n				n	
						Kepegawaian							
2	1	0	2	0	000	Monitoring,	Jumlah Dokumen Monitoring,	12	5.000.000	Larantuka	DAU		15.000.000
	7	1		5	5	Evaluasi, dan	Evaluasi, dan Penilaian	dokume					

			_			1	1						
						Penilaian Kinerja	Kinerja Pegawai	n					
						Pegawai							
2	1	0	2	0	000	Pendidikan dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan	2 orang	15.000.000	Larantuka	DAU	4 orang	75.000.000
-	7	1	_	5	9	Pelatihan	Tugas dan Fungsi	2 orang	10.000.000	Laramana	27.0	. Grang	10.000.000
	'	'		J	0	Pegawai	yang Mengikuti Pendidikan						
						Berdasarkan	dan Pelatihan						
						Tugas dan	dan i didinan						
						Fungsi							
2	1	0	2	0		Administrasi			139.300.000				264.075.000
	7	1		6		Umum Perangkat							
	-	-				Daerah							
2	1	0	2	0	000	Penyediaan	Jumlah paket komponen	3 paket	2.500.000	Larantuka	DAU	3 paket	5.000.000
	7	1		6	1	Komponen	instalasi listrik penerangan						
						Instalasi	bangunan kantor yang						
						Listrik/Peneranga	disediakan						
						n Bangunan							
						Kantor							
2	1	0	2	0	000	Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan	3 paket	15.000.000	Larantuka	DAU	2 paket	40.000.000
	7	1		6	2	Peralatan dan	Perlengkapan kantor yang						
						Perlengkapan	disediakan						
						Kantor							
2	1	0	2	0	000	Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan	1 paket	7.500.000	Larantuka	DAU	1 paket	20.000.000
	7	1		6	3	Peralatan Rumah	Rumah Tangga yang						
						Tangga	disediakan						
2	1	0	2	0	000	Penyediaan	Jumlah paket bahan logistik	1 paket	20.000.000	Larantuka	DAU	1 paket	20.000.000
	7	1		6	4	Bahan Logistik	kantor yang disediakan						
						Kantor							
2	1	0	2	0	000	Penyediaan	Jumlah paket barang cetak	2 paket	20.000.000	Larantuka	DAU	2 paket	39.050.000
	7	1		6	5	Barang Cetakan	dan penggandaan yang						
						dan	disediakan						
		l				Penggandaan	(paket)						

						_								
2	1	0	2	0	000		Penyediaan	Jumlah Dokumen Bahan	2	1.800.000	Larantuka	DAU	2	3.025.000
	7	1		6	6		Bahan Bacaan	Bacaan dan Peraturan	dokume				dokume	
							dan Peraturan	Perundang-Undangan yang	n				n	
							Perundang-	Disediakan						
							undangan							
2	1	0	2	0	000	08	Fasilitasi	Jumlah Laporan Fasilitasi	12	15.000.000	Larantuka	DAU	12	30.000.000
	7	1		6	8		Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu (Rapat dan	laporan				laporan	
				·			1 1011,011.9011 101110	Tamu)	iapora				.apo.a	
2	1	0	2	0	000		Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	12	50.000.000	Larantuka	DAU	12	80.000.000
-	7	1	_	6	9		Rapat Koordinasi	Penyelenggaraan Rapat	laporan	00.000.000	Laramana	D/10	laporan	00.000.000
	'	'		U	3		dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi	ароган				ιαροιαιι	
							SKPD	SKPD						
2	1	0	2	0	001		Penatausahaan	Jumlah Dokumen	1	5.000.000	Larantuka	DAU	1	7.000.000
	7	1	-	6	0		Arsip Dinamis	Penatausahaan Arsip Dinamis	dokume	0.000.000	Laramaka	D/10	dokume	7.000.000
	'	'		U	U		pada SKPD	pada SKPD(dokumen)	n				n	
2	1	0	2	0	001		Dukungan	Jumlah Dokumen Dukungan	12	2.500.000	Larantuka	DAU	12	20.000.000
2	7	1	_	6	1		Pelaksanaan	Pelaksanaan Sistem	dokume	2.300.000	Larantuka	DAU	dokume	20.000.000
	'	'		O	'		Sistem	Pemerintahan berbasis						
							Pemerintahan		n				n	
								elektronik pada SKPD						
							Berbasis							
							Elektronik pada							
							SKPD							
2	1	0	2	0			Penyediaan Jasa			145.500.000			100	444.815.000
	7	1		8			Penunjang Urusan							
							Pemerintahan							
							Daerah							
2	1	0	2	0	000		Penyediaan Jasa	Jumlah laporan penyediaan	. 12	1.500.000	Larantuka	DAU	. 12	1.815.000
	7	1		8	1		Surat Menyurat	jasa surat menyurat (cetak	laporan				laporan	
								kartu kendal surat, lembar						
								disposisi dan buku agenda						
								surat)						
2	1	0	2	0	000		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	12	90.000.000	Larantuka	DAU	12	93.000.000
	7	1		8	2		Komunikasi,	Jasa Komunikasi, Sumber	laporan				laporan	
							Sumber Daya Air	Daya Air dan Listrik yang						
							dan Listrik	Disediakan(laporan)						

						1								
2	1	0	2	0	000		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	12	54.000.000		DAU	12	350.000.000
	7	1		8	4		Pelayanan	Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan				laporan	
							Umum Kantor	yang Disediakan (laporan)						
2	1	0	2	0			Pemeliharaan	Persentase Pemeliharaan	100	47.500.000			100	136.600.000
	7	1		9			Barang Milik	Barang						
	-	-		-			Daerah Penunjang	Milik Daerah Penunjangan						
							Urusan	Urusan						
							Pemerintahan	Pemerintah Daerah(%)						
							Daerah	r cincilitati bacian (70)						
2	1	0	2	0	000		Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	10 unit	30.000.000	Larantuka	DAU	10 unit	51.600.000
2	7	1	_	9	2				10 unit	30.000.000	Larantuka	DAU	10 unit	51.600.000
	1			9			Pemeliharaan,	Operasional atau lapangan						
							Biaya	yang dipelihara						
							Pemeliharaan,	dan dibayarkan pajak dan						
							Pajak dan	perizinannya						
							Perizinan Dinas							
							Operasional atau							
							lapangan							
2	1	0	2	0	000		Pemeliharaan	Jumlah Mebel yang dipelihara	6 unit	2.500.000	Larantuka	DAU	3 unit	25.000.000
	7	1		9	5		Mebeler							
2	1	0	2	0	000		Pemeliharaan	Jumlah peralatan danmesin	7 unit	5.000.000	Larantuka	DAU	5 unit	25.000.000
	7	1		9	6		Peralatan dan	lainnya yang dipelihara						
							Mesin Lainnya							
0	1	0	2	0	000		Pemeliharaan/	Jumlah Gedung kantor dan	1 unit	5.000.000	Larantuka	DAU	1 unit	20.000.000
2	7	1		9	9		Rehabilitasi	bangunan lainnya yang						
				·			Gedung Kantor	dipelihara / direhabilitasi						
							dan Bangunan	(unit)						
							Lainnya	(am)						
0	1	0	2	0	001		Pemeliharaan/	Jumlah Sarana dan Prasarana	2 unit	5.000.000	Larantuka	DAU	2 unit	15.000.000
2	7	1	-	9	1		Rehabilitasi	Pendukung Gedung kantor	Z driit	0.000.000	Larantuka	DAO	Z driit	10.000.000
-	'	'		Э	'		Sarana dan	dan bangunan lainnya yang						
							Prasarana	dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi						
							Pendukung	(unit)						
							Gedung Kantor							
							dan Bangunan							
							Lainnya							

2	1					PROGRAM URUSAN			842.521.900				
	7					KOPERASI							1.178.716.882
2	1	0				Program Pengawasan	prosentase pengawasan dan	50%	36.500.000			52%	42.350.000
	7	3				dan Pemeriksaan	pemeriksaan koperasi						
						Koperasi							
2	1	0	2	0		Pemeriksaan dan			36.500.000			96 unit	42.350.000
	7	3		1		Pengawasan							
						Koperasi,							
						Koperasi Simpan							
						Pinjam / unit							
						Simpan Pinjam							
						Koperasi							
2	1	0	2	0	000	Pelaksanaan	Jumlah Koperasi yang telah	92 unit	36.500.000	19		96 unit	42.350.000
	7	3		1	4	Proses	dilakukan pemeriksaan dan	usaha		Kecamatan		usaha	
						Pemeriksaan dan	pengawasan						
						Pengawasan							
						Koperasi Wilayah							
						Keanggotaannya							
						Daerah							
						Kabupaten/Kota							
2	1	0				Program Penilaian	Presentase penilaian	5.43%	15.000.000			10	55.000.000
	7	4				Kesehatan KSP/USP	kesehatan KSP/USP					Koperasi	
						Koperasi	Koperasi					·	
2	1	0	2	0		Penilaian	•		15.000.000			10	55.000.000
	7	4		1		Kesehatan						Koperasi	
						Koperasi							
						Simpan Pinjam /							
						unit Simpan							
						Pinjam Koperasi							
						yang wilayah							
						keanggotaanny							
						a dalam 1 (satu)							
						Daerah ` ´							
						Kabupaten /							
						Kota							

2	1 7	0 4	2	0	000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10 Koperasi	15.000.000	19 Kecamatan		10 Koperasi	55.000.000
2	1 7	0 5				Kabupaten / Kota Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian	19.57	530.850.000			60	85.800.000
2	1 7	0 5	2	0 1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota			530.850.000			60	85.800.000
2	1 7	0 5	2	0	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian	125	530.850.000	Larantuka		60	85.800.000
2	1 7	0 6				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)	60%	25.000.000		DAU	60%	49.500.000
2	1 7	6	2	0 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a dalam Daerah			25.000.000		DAU		49.500.000

						Kabupaten / Kota							
2	1 7	0 6	2	0 1	000 2		Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya	10 keluarga (kelompo k embrio)	25.000.000	Kec. Adonara (Desa Lamahoda), Kec. Witihama (Desa Lamablawa, Pledo, Balaweling), Kec. Wotan Ulumado (Desa Bliko, Nayubaya), Kec. Adonara Barat (Desa Ile Pati), Kec. Adonara	DAU	20 keluarga (kelompo k embrio)	49.500.000
										Adonara Timur (Desa Kwarlaga), Kec. Solor Timur (Desa Lohayong), Kec. Tanjung Bunga (Desa Gekengderan			

2	1 7	0 7				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)	23,53	65.000.000		DAU	23,53	151.250.000
2	1 7	0 7	2	0 1		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			65.000.000		DAU		151.250.000
2	1 7	0 7	2	0	001 4	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	240 unit usaha	65.000.000	19 Kecamatan		240 unit usaha	72.600.000
2	1 7	0 8				Program Pengembangan UMKM	Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum	1,67	170.171.900		DAU	2,08	794.816.882
2	1 7	0 8	2	0		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			170.171.900		DAU	20 unit usaha	794.816.882

2	1	0	2	0	000	Produksi dan	Jumlah Unit UMKM yang	16 unit	170.171.900	Kec. Titehena	DAU	20 unit	794.816.882
	7	8		1	6	Pengolahan,	Mendapatkan Fasilitas	usaha		(Desa		usaha	
						Pemasaran,	Produksi dan Pengolahan,			Leraboleng,			
						Sumber Daya	Pemasaran, Sumber Daya			Tuakepa,			
						Manusia, Serta	Manusia, Serta Desain dan			Watowara),			
						Desain dan	Teknologi			Kec.			
						Teknologi	Ŭ			Wulanggitang			
						J				(Desa Boru,			
										Hewa), Kec			
										Lewolema			
										(Desa			
										Riangkotek),			
										Kec. Adonara			
										Tengah (Desa			
										Wewit, Lite),			
										Kec.			
										Larantuka			
										(Kel. Sarotari,			
										Lokea,			
										Sarotari			
										Tengah,			
										Balela, Pohon			
										Bao), Kec.			
										Witihama			
										(Desa			
										Honihama)			



BAB. V

PENUTUP

RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2024 melalui pelaksanaan program, Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA Tahun2024 sebagai berikut:

- Semua stakeholders yang berkepentingan dalam pembangunan daerah Perkebunan dan Peternkan di Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RENJA Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RENJA;
- 2. Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran,program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Tahun 2024, serta



2024

kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya;

3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan,melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RENJA ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RENJA Tahun 2024 ini.

Demikian RENJA Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengan Kabupaten Flores Timur,

NIP. 19650516 199203 1 008